

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER, DAN BELANJA MODAL TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015–2024

[The Influence Of Regional Original Revenue (PAD), Transfer Funds, And Capital Expenditure On Economic Growth Rate In West Nusa Tenggara Province For The Period 2015–2024]

Baiq Nurmalia^{1)*}, Iwan Harsono²⁾, Himawan Sutanto³⁾, Endang Astuti⁴⁾, Titi Yuniarti⁵⁾

Universitas Mataram

malabaiq58@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Pemerintah Pusat (DTB), dan Belanja Modal (BM) terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rentang waktu 2015 hingga 2024. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui regresi linear berganda berbasis data sekunder, dengan pengujian asumsi klasik untuk menjamin kelayakan model estimasi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditunjukkan oleh nilai F-statistik sebesar 15,47 ($p < 0,05$) dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,82828. Namun, uji parsial mengindikasikan bahwa hanya variabel DTB yang memberikan pengaruh signifikan secara statistik dengan arah hubungan negatif, sementara variabel PAD dan BM tidak menunjukkan signifikansi individual. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan dana transfer antarpemerintah serta optimalisasi strategi peningkatan PAD dan pengalokasian belanja modal yang produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan

Kata kunci: *pertumbuhan ekonomi; pendapatan asli daerah; dana transfer; belanja modal*

ABSTRACT

This study aims to assess the impact of Locally-Generated Revenue (PAD), Central Government Transfers (DTB), and Capital Expenditure (BM) on the dynamics of economic growth in West Nusa Tenggara Province over the period 2015 to 2024. The analysis adopts a quantitative approach using multiple linear regression on annual secondary data, supported by classical assumption tests to ensure the validity of the estimation model. The results indicate that, collectively, the three independent variables significantly influence regional economic growth, as reflected by an F-statistic value of 15.47 ($p < 0.05$) and a coefficient of determination (R^2) of 0.82828. However, partial testing reveals that only DTB has a statistically significant effect, with a negative relationship, while PAD and BM are not individually significant. These findings highlight the need to enhance the efficiency of intergovernmental transfer management and to optimize strategies for improving local revenue generation and allocating capital expenditures productively, in order to support sustainable regional economic development.

Keywords: *economic growth; regional original revenue; fiscal transfers; capital expenditure*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan tolok ukur fundamental dalam menilai keberhasilan pembangunan regional, karena mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan mengelola instrumen fiskal secara efisien (Ginting et al., 2019). Penerapan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur aspek keuangannya secara mandiri. Kewenangan ini mencakup upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola dana transfer dari pemerintah pusat, serta menyusun strategi pengeluaran daerah yang lebih produktif, termasuk dalam bentuk belanja modal yang berorientasi pembangunan (Puspita & Hamidi, 2021). Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran PAD, dana transfer, dan belanja modal menjadi elemen krusial yang saling berkaitan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemandirian fiskal suatu daerah semakin meningkat seiring dengan kemampuan PAD dalam mendanai kegiatan pembangunan tanpa ketergantungan berlebih terhadap dana dari pemerintah pusat (Halim & Kusufi, 2017).

Dalam teori keuangan publik, pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian yaitu alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi (Richard A. Musgrave, 1989). Fungsi alokasi diwujudkan melalui kebijakan belanja, terutama dalam penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Di tingkat daerah, belanja modal memegang peranan penting sebagai instrumen untuk memperluas kapasitas produksi dan mempercepat pembangunan sarana ekonomi yang esensial (Irwan et al., 2022). Kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskalnya, baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat. Efektivitas kebijakan fiskal di daerah turut ditentukan oleh proporsi belanja yang dialokasikan untuk kegiatan produktif, terutama belanja modal (Rahman et al., 2022). Instrumen transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) dirancang untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, sehingga dapat mendukung penyediaan layanan publik yang lebih merata dan berkualitas (DJPk, 2023).

Berbagai penelitian empiris telah mengeksplorasi keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan belanja modal terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Penelitian oleh Laodini et al., (2023) di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2010 hingga 2021 menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan, sementara dana transfer memberikan dampak positif meskipun tidak signifikan, serta belanja modal justru berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Putra et al. (2024) dalam konteks Kabupaten Jombang, di mana dana transfer terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan, sedangkan PAD dan belanja modal tidak menunjukkan hubungan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penelitian oleh Etika et al. (2022) di Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan, namun PAD memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kajian dari Hendriwiyanto (2019) di wilayah Sulawesi menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berperan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Adapun temuan dari Hutapea (2023) di Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa baik PAD maupun belanja modal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta dana transfer berfungsi memperkuat pengaruh kedua variabel tersebut melalui mekanisme moderasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah di kawasan timur Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam serta sektor pariwisata yang prospektif. Kendati demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi di daerah ini belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami variasi yang cukup tajam, dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti gejolak ekonomi global,

dinamika makroekonomi nasional, serta krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang secara signifikan membatasi aktivitas ekonomi masyarakat (BPS NTB, 2024). Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola dana transfer dari pemerintah pusat, serta peningkatan belanja modal yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Meskipun berbagai strategi telah dijalankan, data menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan dominasi dana transfer pusat, yang mengindikasikan adanya tingkat ketergantungan fiskal yang cukup tinggi (BPS NTB, 2023). Ketergantungan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, dinamika belanja modal yang cenderung fluktuatif mencerminkan permasalahan pada tahap perencanaan hingga implementasi proyek infrastruktur daerah (Bappeda NTB, 2023).

Secara empiris, sejumlah studi terdahulu umumnya menemukan bahwa belanja modal memiliki dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, karena belanja ini menciptakan infrastruktur dan layanan publik yang mendorong produktivitas. Namun demikian, temuan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer belum menunjukkan konsistensi, karena efeknya seringkali bergantung pada konteks wilayah serta pendekatan analisis yang digunakan (AlQomariah et al., 2022). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan variabel-variabel fiskal tersebut menggunakan data deret waktu selama satu dekade terakhir masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian yang ada cenderung memanfaatkan pendekatan cross section atau deskriptif yang kurang mampu menangkap hubungan dinamis dan kausal antarkomponen fiskal. Oleh karena itu, studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut baik dari sisi pendekatan metodologis maupun kontribusi empiris, dengan harapan dapat memperkuat kerangka analisis dalam perumusan kebijakan fiskal berbasis data.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan PAD, dana transfer, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2015–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat dalam merancang mekanisme transfer fiskal yang lebih adil dan efisien bagi daerah-daerah di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam konteks penguatan kapasitas fiskal daerah, perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Analisis yang dilakukan tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi daerah, tetapi juga mendukung upaya desentralisasi fiskal yang berkeadilan dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis studi asosiatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguji hubungan antara PAD, dana transfer, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari publikasi resmi instansi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan cakupan data tahunan selama periode 2015 hingga 2024. Unit analisis yang digunakan adalah data *time series* tingkat provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menghimpun data makro ekonomi dan keuangan daerah dari sumber yang telah diverifikasi. Analisis data dalam studi ini dilakukan melalui pendekatan regresi linear berganda. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik EViews versi 12. Pemilihan model ini merujuk pada argument Damodar N. Gujarati (2009) yang menyatakan bahwa regresi linear berganda efektif untuk mengestimasi hubungan linier antara variabel dalam konteks ekonometrika. Model matematis dari regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{LogPAD} + \beta_2 \text{LogDTB} + \beta_3 \text{LogBM} + \varepsilon$$

di mana

GE : Laju Pertumbuhan Ekonomi
 LogPAD : Pendapatan Asli Daerah
 LogDTB : Dana Transfer,
 LogBM : Belanja Modal
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Konstanta
 ε : Error

Selanjutnya untuk memastikan validitas model, penelitian ini melakukan serangkaian pengujian asumsi klasik sebagai prasyarat validitas regresi linear. Uji normalitas residual dilakukan dengan pendekatan Jarque-Bera guna memastikan bahwa sebaran galat bersifat normal. Selanjutnya pengujian multikolinearitas diterapkan dengan mengamati nilai VIF guna mendeteksi kemungkinan hubungan linier antar variabel independen. Deteksi potensi heteroskedastisitas dilakukan melalui uji Glejser dan Breusch-Pagan, sementara uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson guna menilai ada tidaknya korelasi serial pada nilai residual (N. D. Gujarati & Porter, 2013) Setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis melalui uji statistik parsial (uji t) guna mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, pengujian simultan dilakukan menggunakan uji F untuk menilai apakah variabel PAD, dana transfer, dan belanja modal secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai koefisien determinasi (R^2) juga dihitung sebagai indikator proporsi variabilitas pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan oleh model. Seluruh tahapan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik EViews versi 12, dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$) untuk menjamin validitas inferensial Pengembangan Hipotesis

Pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama yang mencerminkan sejauh mana kemampuan fiskal suatu daerah dalam mendanai pembangunan secara mandiri, tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Beberapa kajian empiris, seperti yang dilakukan oleh Sucito et al. (2023), menemukan adanya korelasi positif antara peningkatan PAD dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional, meskipun terdapat perbedaan dampak antar wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi masing-masing.

H1 : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dana Transfer terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung kapasitas keuangan daerah dan memperkecil kesenjangan fiskal antar wilayah. Namun, efektivitas dana transfer masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Penelitian oleh Hendriwiyanto (2019) dan Rahman et al. (2022) menunjukkan bahwa dampak dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi tidak seragam; pada beberapa kasus memberikan kontribusi positif, namun dalam kondisi tertentu justru menjadi sumber inefisiensi fiskal apabila tidak dikelola secara optimal

H2 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Belanja modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan aset strategis jangka panjang yang mendukung produktivitas ekonomi. Investasi ini meliputi pembangunan sarana transportasi, fasilitas publik, dan sektor ekonomi dasar lainnya yang memiliki efek ganda terhadap perekonomian lokal. Penelitian oleh Etika et al. (2022) menemukan bahwa belanja modal jika diarahkan secara efisien dan produktif cenderung memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, terutama dalam jangka menengah dan panjang.

H3 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PAD, Dana Transfer, Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Interaksi antara kapasitas fiskal lokal, dukungan dana pusat, dan arah kebijakan belanja modal akan menentukan seberapa besar pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.. Penelitian Putra et al. (2024) menyimpulkan bahwa ketiganya secara bersama-sama memberikan pengaruh simultan yang signifikan terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, tergantung pada struktur fiskal dan arah kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan.

H4 : Pendapatan Asli Daerah, dana transfer, dan belanja modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi (D. N. Gujarati, 2003). Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 1. Test Multikolinearitas

Tabel 1. Test Multikolinearitas		
	Uncentered VIF	Centered VIF
LogPAD	28.10189	1.217489
LogDTB	7.158954	1.292449
LogBM	3.856609	1.071412

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji nilai VIF untuk seluruh variabel berada di bawah ambang batas 10 (LogPAD = 1.217489; LogDTB = 1.292449; LogBM = 1.071412), sehingga dapat disimpulkan bahwa model lolos uji multikolinearitas

Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi ketika varians error tidak konstan pada semua tingkat variabel independen (Widarjono, 2005).

Tabel 2. Test Heteroskedastisitas			
F-statistic	0.865236	Prob. F(6,3)	0.5087
Obs*R-squared	3.019773	Prob. Chi-Square(6)	0.3886
Scaled explained SS	0.926257	Prob. Chi-Square(6)	0.8191

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji Obs*R-squared dengan nilai probabilitas sebesar 0.3886 (> 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa model ini lolos uji *heteroskedastisitas*.

Autokorelasi

Autokorelasi terjadi ketika residual dalam model regresi saling berkorelasi antar satu observasi dengan lainnya dalam urutan waktu atau ruang (Widarjono, 2005).

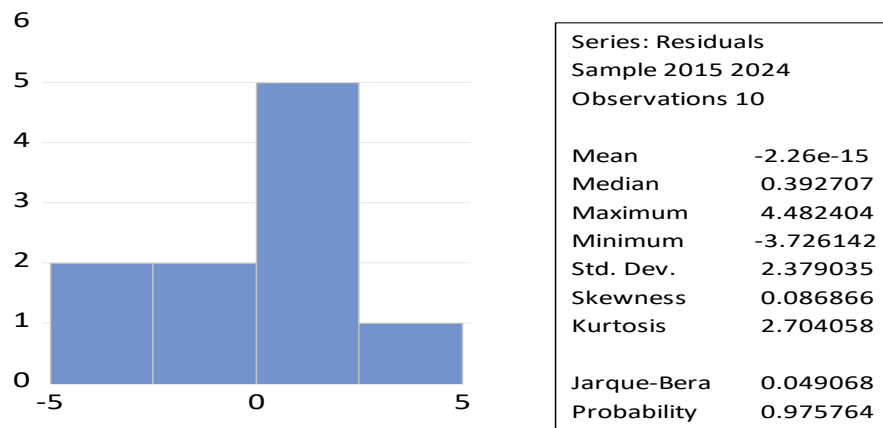
Tabel 3. Test Autokorelasi			
F-statistic	1.262789	Prob. F(2,4)	0.3757
Obs*R-squared	3.870276	Prob. Chi-Square(2)	0.1444

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji Obs*R-squared menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.1444 (> 0.05), yang mengindikasikan bahwa model lolos uji *autokorelasi*.

Normalitas

Multikolinearitas terjadi ketika terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi (Widarjono, 2005).



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji *Jarque-Bera*, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.975 (> 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob	Keterangan
LogPAD	6.961394	1.964105	0.0971	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$
LogDTB	-28.64616	-6.716743	0.0005	Dana transfer berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$
LogBM	-0.340654	-1.022864	0.3458	Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$
F-statistics = 15.47095		R-square = 0.82828		
F-table = 4,76		P-value = 0.003137		
t-table = 2,447				

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan estimasi model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh sejumlah temuan yang relevan. Pertama, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,828 menunjukkan bahwa sekitar 82,8% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yang dimasukkan dalam model. Hal ini mencerminkan kekuatan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel (N. D. Gujarati & Porter, 2013). Hasil uji simultan (uji F) menghasilkan nilai F-statistic sebesar 15,47 dengan tingkat signifikansi (p -value = 0,003137), yang jauh berada di bawah batas signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara kolektif, ketiga variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam model penelitian. Selanjutnya, uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel logaritma Dana Transfer dari Pemerintah Pusat (LogDTB) yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel ini memiliki koefisien regresi sebesar -28,64616, nilai t-statistik -6,716743, dan p -value sebesar 0,0005 yang lebih kecil dari 0,05, menandakan adanya pengaruh negatif yang signifikan secara statistik. Sementara itu, variabel LogPAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan koefisien positif sebesar 6,961394, namun dengan p -value sebesar 0,0971, sehingga secara statistik tidak signifikan. Demikian pula, variabel LogBM (Belanja Modal) tercatat

memiliki koefisien negatif -0,340654, namun p-value sebesar 0,3458, menunjukkan bahwa pengaruhnya juga tidak signifikan secara statistik.

Pembahasan

Pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama periode 2015–2024. Artinya, peningkatan PAD belum mampu secara nyata mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam perspektif teori fiskal daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dari tingkat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah, karena menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunannya melalui sumber pendapatan internal tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2002). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, peningkatan PAD diyakini mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Oates, 2003). Penelitian oleh Sucito et al. (2023) menemukan bahwa di beberapa provinsi di Indonesia, PAD memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun signifikansinya sangat bergantung pada efektivitas penggunaan PAD itu sendiri.

Ketidaksignifikanan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi NTB disebabkan oleh masih dominannya sumber PAD konvensional seperti pajak kendaraan dan retribusi jasa umum yang kontribusinya terbatas terhadap ekspansi ekonomi. Selain itu, lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya inovasi fiskal turut menghambat efektivitas PAD. Oleh karena itu, peningkatan PAD perlu disertai perencanaan berbasis output dan diarahkan pada sektor produktif. Oleh karena itu, secara praktis, pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan reformasi strategi pengelolaan PAD, antara lain dengan memperluas basis pajak melalui digitalisasi layanan perpajakan daerah, mendorong inovasi sumber pendapatan dari potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta menerapkan pendekatan berbasis kinerja dalam penggunaan PAD. Disarankan pula agar PAD diarahkan pada belanja publik yang memiliki nilai tambah tinggi dan dampak ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi lokal, revitalisasi pasar tradisional, atau pelatihan vokasional bagi tenaga kerja muda. Dengan pendekatan ini, PAD tidak hanya menjadi sumber penerimaan rutin, tetapi juga instrumen pembangunan yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Dana Transfer terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil estimasi model regresi mengungkapkan bahwa dana transfer menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan ini mengisyaratkan bahwa peningkatan alokasi dana transfer justru berkorelasi dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi regional. Secara teoritis, fenomena tersebut mencerminkan adanya pemanfaatan dana yang kurang optimal, di mana sebagian besar dana transfer terdistribusi pada komponen belanja rutin yang tidak memiliki efek pengganda ekonomi secara langsung. Ketergantungan fiskal yang berlebihan terhadap dana pusat tanpa adanya penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal dapat membatasi ruang inovasi kebijakan, mengurangi insentif efisiensi fiskal, dan menurunkan efektivitas alokasi anggaran publik. Hasil ini sejalan dengan temuan menunjukkan bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) justru memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah di wilayah Sulawesi. Demikian pula, studi Rahman et al. (2022) menekankan bahwa peningkatan dana transfer tidak secara otomatis mendorong akselerasi pertumbuhan apabila tidak dibarengi dengan praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya menekankan pada besaran dana transfer, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya di tingkat daerah.

Secara teoretis, temuan ini memberikan nuansa kritis terhadap asumsi desentralisasi fiskal Oates (2003) yang menyatakan bahwa transfer dana dari pusat seharusnya mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan efisiensi alokasi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas transfer sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan perencanaan daerah. Implikasi teoretis dari hasil ini adalah perlunya evaluasi atas model transfer fiskal di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah

yang masih belum memiliki kesiapan kelembagaan yang kuat. Sedangkan dari sisi praktis, hasil ini menuntut reformasi dalam sistem perencanaan dan pemanfaatan dana transfer di NTB. Pemerintah daerah perlu memperkuat proporsi belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan UMKM, dan layanan dasar, dibandingkan hanya mengandalkan belanja operasional. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendesain ulang skema transfer agar lebih berbasis kinerja dan mendorong outcome pembangunan, bukan sekadar penyerapan anggaran. Desain insentif berbasis capaian (*performance-based transfers*) dapat menjadi alternatif untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang ditransfer benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Hal ini menjadi krusial untuk menghindari jebakan fiskal di mana daerah menerima dana dalam jumlah besar tetapi tetap stagnan dalam pertumbuhan ekonominya.

Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai koefisien regresi yang negatif dan tidak signifikan mencerminkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja modal selama periode pengamatan belum optimal dalam menstimulus kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Secara konseptual, belanja modal diposisikan sebagai bentuk investasi publik jangka panjang yang seharusnya mampu menciptakan infrastruktur strategis, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memperbesar kapasitas produksi di tingkat regional (Richard A. Musgrave, 1989). Ketidakefektifan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor struktural di NTB, seperti perencanaan anggaran yang kurang matang, pelaksanaan proyek yang tertunda hingga akhir tahun anggaran, atau belanja modal yang diarahkan pada proyek fisik yang tidak memiliki dampak langsung terhadap ekonomi lokal. Selain itu, lemahnya koordinasi antarsektor dan kurangnya evaluasi berbasis hasil juga menyebabkan realisasi belanja modal tidak sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi jangka panjang. Proyek yang bersifat monumental, seperti pembangunan gedung atau fasilitas seremonial, masih sering menggeser alokasi untuk sektor dengan multiplier effect tinggi seperti pariwisata, pertanian dan pengembangan UMKM.

Secara teoretis, meskipun belanja modal diakui sebagai salah satu pilar kebijakan fiskal dalam teori pertumbuhan ekonomi Todaro & Smith (2020), efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola publik di tingkat daerah. Dengan kata lain, bukan besar kecilnya belanja modal yang menentukan pertumbuhan, tetapi bagaimana belanja tersebut dirancang, disalurkan, dan diawasi. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan *outcome-based budgeting* dalam pengelolaan belanja publik, agar anggaran tidak hanya fokus pada output fisik, tetapi pada hasil nyata bagi ekonomi masyarakat. Dari sisi praktis, pemerintah daerah NTB perlu memperbaiki proses perencanaan dan penyaluran belanja modal dengan memastikan bahwa setiap proyek diarahkan ke sektor-sektor yang mendukung produktivitas lokal. Reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM perencanaan anggaran, dan penggunaan data berbasis spasial dan sektoral dapat membantu memastikan bahwa investasi publik benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Selain itu, belanja modal juga perlu dikaitkan dengan strategi pembangunan daerah jangka menengah, agar kesinambungan program dapat dijaga dan dampaknya terakumulasi dalam jangka Panjang

PAD, Dana Transfer, Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil estimasi regresi memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana transfer, dan belanja modal secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan ini mencerminkan bahwa ketiga variabel fiskal tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi regional. Tingginya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa proporsi besar variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh interaksi ketiga instrumen tersebut. Namun, efektivitas kontribusi masing-masing variabel sangat dipengaruhi oleh bagaimana dana tersebut dirancang, dikelola, dan digunakan dalam konteks kebijakan pembangunan. Ketidakseimbangan proporsi antara PAD yang rendah dan dominasi dana transfer memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal NTB masih belum sepenuhnya mandiri. Di sisi lain, meskipun belanja modal merupakan instrumen investasi

jangka panjang, ketidakefektifan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan berpotensi menurunkan dampaknya terhadap pertumbuhan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini sangat penting. Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi untuk mengoptimalkan PAD melalui perluasan basis pajak, intensifikasi retribusi daerah yang bernilai tambah tinggi, serta digitalisasi sistem pemungutan. Di saat yang sama, evaluasi terhadap efektivitas dana transfer menjadi krusial. Ketergantungan fiskal yang tinggi tanpa strategi penguatan ekonomi lokal hanya akan memperdalam ketimpangan struktural. Perlu ada pendekatan berbasis kinerja dalam alokasi dan penggunaan transfer fiskal, agar mendorong akuntabilitas dan outcome yang lebih terukur. Selain itu, belanja modal harus diarahkan pada sektor dengan multiplier effect tinggi seperti infrastruktur dasar, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif lokal. Secara teoretis, temuan ini mendukung kerangka teori Keynesian dan desentralisasi fiskal, yang menekankan peran belanja pemerintah dan transfer antarlevel pemerintahan dalam menstimulasi pertumbuhan. Secara praktis, hasil ini menggarisbawahi perlunya sinergi antara kemandirian fiskal daerah dan kebijakan transfer pusat agar pertumbuhan ekonomi di wilayah seperti NTB menjadi lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Reformasi pengelolaan keuangan daerah berbasis data, akuntabilitas fiskal, dan integrasi perencanaan lintas sektor menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya nominal, tetapi juga substantif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2015–2024. Namun, ketika dianalisis secara parsial, hanya variabel dana transfer yang menunjukkan hubungan signifikan dengan arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan dana transfer oleh pemerintah daerah, serta menandakan bahwa optimalisasi pengelolaan fiskal masih menjadi tantangan struktural yang perlu segera diatasi (Richard A. Musgrave, 1989). Keterbatasan penelitian ini terletak pada rentang waktu data yang digunakan, yang hanya mencakup hingga tahun 2024, serta ruang lingkup geografis yang terbatas pada satu wilayah administratif, yaitu Provinsi NTB. Oleh karena itu, interpretasi hasil sebaiknya dilakukan secara kontekstual dan tidak digeneralisasi secara nasional tanpa penelitian lanjutan lintas provinsi. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam meningkatkan kapasitas PAD dan efisiensi alokasi belanja pembangunan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat regional.

Saran

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan PAD melalui inovasi kebijakan pajak dan retribusi yang berbasis potensi lokal, seperti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan publik. Penggunaan dana transfer dari pusat perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan alokasinya tepat sasaran dan berorientasi pada belanja produktif, bukan sekadar belanja rutin. Belanja modal harus difokuskan pada proyek strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur dasar, pendidikan vokasi, dan dukungan terhadap UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- AlQomariah, A. N. R., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 60–69. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.9>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023*.

- https://bappenda.ntbprov.go.id/doc/ppid/Lap_Kinerja_Bappenda_2023.pdf
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi nusa Tenggara Barat 2022* (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2024*.
<https://ntb.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/375b8367273e8c7900e8174e/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2024.html>
- Damodar N. Gujarati, D. C. P. (2009). Basic Econometrics. In *The McGraw-Hill companies*.
https://ucanapplym.s3.ap-south-1.amazonaws.com/RGU/notifications/E_learning/Online_study/Basic-Econometrics-5th-Ed-Gujarati-and-P.pdf
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). (2023). *Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Buku Saku APBN 2023*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?cat=459>
- Etika, C., Rachmania, R., & Pitri, M. E. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 1052–1058. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4991>
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic growth in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2), 152–160.
<https://doi.org/10.20885/ejem.vol11.iss2.art3>
- Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. In *The Economic Journal* (Vol. 82, Issue 326).
<https://doi.org/10.2307/2230043>
- Gujarati, N. D., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika. Buku 1 dan Buku 2 Edisi 5*.
<https://id.scribd.com/document/466415966/40447-ina>
- Halim & kusufi. (2017). Akuntansi Sektor Publik. In *Universitas Mulawarman* (Issue 25).
http://repository.upm.ac.id/2568/1/Buku_Digital_-_AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_compressed.pdf
- Hendriwiyanto, G. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Hutapea, R. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 1–23.
- irwan, Mursalim, & Nurwanah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan). *Journal of Accounting & Finance (JAF)*, 3(1).
- Laodini, A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara Periode 2010 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 217–228.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/49639>
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. In *Procedia Manufacturing* (Vol. 1, Issue 22 Jan).
- Oates, W. E. (2003). An essay on fiscal federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, XXXVII(September), 13–47. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). DESENTRALISASI FISKAL Dua Dekade Implementasi. In *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Putra, N., Pratiwi, L. I., Al-sakinah, P. S., Eko, M. D., & Safari, T. (2024). Pengaruh PAD , TKDD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jombang. *Economic and*

Busnies Management Journal, 6(2), 279–284. <https://doi.org/10.556442>

- Rahman, A. G., Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. (2022). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Wilayah Sulawesi). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2), 64–74. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i2.9122>
- Richard A. Musgrave, P. B. M. (1989). Fiscal policy for economic growth. In *Economists' Voice* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>
- Sucito, A., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2023). The Effect of Income on Capital Expenditure with Budget Surplus as a Moderating Variable. *Journal of World Science*, 2(3), 316–324. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.234>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Widarjono, A. (2005). Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. In *Ekonisia*.